

**ARTIKEL PPMDI**

**“HAKIKAT DEMOKRASI DALAM PANDANGAN ISLAM”**

**DOSEN PENGAMPU**

**Dr. H. Dwi Surya Atmaja, MA.**

**Wahyu Nugroho, M.H.**



**DISUSUN OLEH**

**VIRA ARDIYATI (12001091)**

**SEMESTER/KELAS : V/C**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**TAHUN AKADEMIK 2023**

# Hakikat Demokrasi Dalam Pandangan Islam

## Abstrak

Demokrasi adalah gagasan pokok yang selalu hangat dan tak pernah berhenti dibicarakan. Demokrasi kerap kali dihubungkan dengan berbagai persoalan dalam hidup manusia saat ini, baik dalam urusan negara maupun agama. Demokrasi merupakan istilah luar yang muncul dari Barat dan mempunyai sejarah dan perspektif berbeda dengan yang ada di dalam Islam. Sehingga, muncullah berbagai pendapat mengenai demokrasi dalam pandangan Islam. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui hakikat demokrasi dan bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam. Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya pendapat yang memperdebatkan mengenai bagaimana hakikat demokrasi dalam pandangan Islam sendiri. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam kaitannya dengan agama, khususnya agama Islam, demokrasi merupakan topik menarik dan hangat untuk dibicarakan. Sehingga tulisan ini mencoba menerangkan mengenai hakikat demokrasi dalam pandangan Islam, mulai dari hakikat demokrasi, serta bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam. Demokrasi mengandung arti kebebasan, dimana kedaulatan tertinggi diberikan kepada rakyat. Demokrasi dalam Islam lebih condong ke istilah syura. Dalam hal ini, syura merupakan bagian kecil dari demokrasi. Sejatinya, demokrasi yang bernilai keagamaan (religius) sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam memberikan landasan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dalam membangun sistem demokrasi.

**Kata Kunci:** *demokrasi, Islam, syura*

## Pendahuluan

Dewasa ini, demokrasi merupakan salah satu gagasan menarik yang dibicarakan para cendekiawan muslim. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia dan didefinisikan sebagai suatu sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyatlah pusat penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, segala keputusan yang ditetapkan pemerintah harus mengedepankan kesejahteraan rakyat.

Konsep demokrasi awalnya berasal dari gagasan Yunani kuno yang digunakan dalam mengelola kehidupan negara sejak abad keenam sebelum masehi hingga abad keenam Masehi. Perdebatan tentang demokrasi muncul secara alami karena demokrasi merupakan kata asing yang berasal dari luar Islam, yakni Barat, namun diterapkan di

banyak negara yang mayoritasnya Muslim. Pendapat berbeda muncul dalam interpretasi tentang esensi demokrasi Islam.

Dalam tulisan karya Hasan Basri yang berjudul "Pandangan Islam Terhadap Sistem Demokrasi", ia berpendapat dalam demokrasi terdapat sesuatu yang perlu digarisbawahi hal yang tidak sejalan dengan akidah Islam, yaitu kekuasaan yang diserahkan ke tangan rakyat. Apabila kekuasaan diberikan sepenuhnya kepada rakyat, artinya rakyat jadi mempunyai wewenang sepenuhnya dalam sebuah negara dan dapat menetapkan kebijakan bahkan hukum yang berlaku di dalamnya. Ia juga berpendapat demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang tidak tepat dan cenderung buruk, dimana yang terlibat di dalamnya ikut terpengaruh buruk.

Di dalam tulisan ini, penulis berusaha mengembangkan integrasi atau hubungan antara Islam dan demokrasi. Demokrasi memang berbeda dengan Islam. Namun, Islam tidak menolak sistem ini bahkan Islam memberikan landasan yang kuat dalam menjalankan demokrasi. Karena sebenarnya prinsip-prinsip di dalam demokrasi juga terkandung dalam ajaran islam seperti kebebasan, tanggung jawab, persamaan, musyawarah dan sebagainya. Jika demokrasi merupakan sistem yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kesamaan, dan kedaulatan rakyat dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, maka yang demikian itu, dapat dikatakan bahwa demokrasi memiliki titik temu dengan islam.

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui hakikat demokrasi dan bagaimana Islam dalam memaknainya. Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya pendapat yang memperdebatkan mengenai bagaimana pandangan Islam terkait hakikat demokrasi itu sendiri. Artikel ini mencoba menerangkan hakikat demokrasi dalam pandangan Islam, mulai dari pengertian demokrasi, serta bagaimana pandangan terhadap demokrasi ini.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mengetahui pendapat seseorang mengenai suatu topik. Penelitian jenis ini biasanya digunakan untuk mendapatkan banyak data naratif. Penulis juga menggunakan studi pustaka dengan membaca literatur dan mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan terpercaya dan relevan terkait topik yang dibahas.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hakikat Demokrasi**

Secara epistemologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, "*Demos*", "*Cratos/Cratein*" yang berarti kekuasaan, rakyat. Demokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang mana kekuasaan tertinggi diberikan kepada rakyat. Hal ini mengandung makna bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki wewenang atas setiap keputusan dan kebijakan dari sebuah negara (Masri, 2010). Demokrasi merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami. Hal ini tentu saja karena banyaknya pendapat dari para pemikir dunia, sehingga setiap pemikiran memiliki sudut pandang berbeda mengenai demokrasi sendiri.

Menurut Roschwald yang mendefinisikan kebebasan yang diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kebebasan ini meliputi bebas dalam berbicara dan berpendapat, bebas memeluk agama, kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari kemiskinan, kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berkumpul (berserikat), termasuk juga kebebasan semua orang untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan sebagai salah satu hak yang dimilikinya. Harus ada kesetaraan dan keadilan dalam diberlakukannya hukum. Hukum tidak boleh memandang agama, ras, suku, apalagi status ekonomi maupun sosial seseorang (Ichsan, 2014).

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai puncak pemegang segala kekuasaan dengan tujuan mewujudkan kepentingan negara (Umar, 2004). Dapat dipahami bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat dijadikan pemegang puncak segala kedaulatan dalam melaksanakan dan mencapai tujuan serta kepentingan negara.

Mengutip pendapat dari Abraham Lincoln, demokrasi memiliki pengertian sebagai pemerintahan yang datangnya dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi dalam pelaksanaan demokrasi ini yang memiliki peran utama ialah rakyat dari negara itu sendiri, bukannya pemerintah (Wahidi, 2015). Tentu dalam hal ini rakyat diberikan kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa batas, namun kebebasan yang mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demokrasi juga dapat dikatakan sistem dari sebuah negara dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Demokrasi

membebasakan rakyatnya untuk membuat keputusan untuk berpolitik di mana rakyatnya diberi dukungan untuk memutuskan bagaimana bersaing lewat pemilu. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana segala keputusan atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah haruslah mengutamakan kepentingan rakyat. Demokrasi adalah suatu sistem dimana pemerintahan harus bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakan dan keputusan yang diambil. Selain itu, demokrasi adalah sistem politik yang memperlihatkan keputusan yang diambil oleh wakil rakyat ditentukan berdasarkan kepentingan mayoritas dan diawasi oleh rakyat (Darmawati, 2013).

Terdapat beberapa norma atau aturan dalam pelaksanaan demokrasi, yaitu kesadaran akan pluralitas sangatlah penting, adanya musyawarah, cara yang diterapkan haruslah selaras terhadap tujuan yang ingin dicapai, hasil musyawarah atau mufakat yang dihasilkan harus diperoleh secara jujur dan sehat, adanya rencana terhadap pemenuhan kepentingan bersama, saling membantu, saling percaya dan berperilaku baik, perlunya pendidikan demokrasi (Bakry, 2014).

Kata demokrasi telah banyak mengalami perubahan interpretasi dan makna, dimulai dari makna aslinya yaitu pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat. Perlu kita pahami bahwa ada suatu sistem pemerintahan yang mana setiap orang mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Tentu saja istilah pemerintah oleh rakyat ini harus ditelaah lebih dalam. Dalam pelaksanaan demokrasi ini yang memiliki peran utama ialah rakyat dari negara itu sendiri, bukannya pemerintah.

Layaknya istilah sosiopolitik lainnya, demokrasi tidak mempunyai definisi yang pasti dan tetap. Demokrasi bisa saja berbeda makna di pikiran setiap orang. Tidak ada yang menjamin bahwa pemikiran setiap orang mengenai demokrasi akan sama. Maka dari itu, makna demokrasi tergantung pada masing-masing pemikirnya. Karena demokrasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis dengan makna berbeda setiap saat, tergantung situasi yang mempengaruhinya. Pada dasarnya, struktur sosial dan budaya lokal dari masyarakat juga turut mempengaruhi dan membentuk pemikiran mengenai demokrasi sendiri. Oleh karena itu, pemaknaan demokrasi di negara yang satu bisa jadi berbeda dengan demokrasi di negara lain .

Pentingnya demokrasi sebagai fondasi hidup dalam masyarakat dan bangsa berarti bahwa rakyat menentukan hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk evaluasi kebijakan nasional. Karena kebijakan nasional ini menentukan kehidupan

masyarakat. Oleh karena itu, negara yang diselenggarakan berdasarkan kemauan dan kepentingan rakyat merupakan ciri negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan kehidupan negaranya. Jika dilihat dari segi organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian yang dilakukan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi adalah sebuah proses menuju masyarakat Madani yang berjalan secara dinamis (Sukron Kamil, 2002).

Demokrasi menunjukkan sistem pemerintahan yang jauh berbeda dari prinsip kediktatoran atau monarki. Demokrasi mencakup prinsip, nilai, ide yang memaknai bahwa kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan sering disebut sebagai pemerintahan oleh rakyat, artinya rakyat sebagai mayoritas melalui saluran yang tersedia memiliki suara yang menentukan dalam membentuk kebijakan pemerintah. Demokrasi menjamin rakyat atas kebebasan berpendapat. Kebebasan yang dimaksudkan bukan kebebasan yang dalam artian sebebas-bebasnya, namun kebebasan yang bertanggung jawab.

Konsep demokrasi awalnya berasal dari gagasan Yunani kuno sejak abad ke-6 sebelum masehi hingga abad ke-6 Masehi. Konsep ini pada saat itu merupakan keputusan dibuat oleh semua warga negara segera setelah prosedur mayoritas (Paripurna, 2015).

Ide ini berakhir pada saat yang sama, yakni adanya kemauan dengan tujuan menerapkan kembali demokrasi. Munculnya Piagam Besar yang berisi kesepakatan para bangsawan dan Raja Inggris saat itu merupakan awal lahirnya demokrasi empiris. Dinamika lain yang menjadi alasan kebangkitannya di negara-negara Barat ialah Renaisans. Renaisans memicu keinginan sastrawan saat itu. Renaisans bermula saat menitikberatkan penghormatan terhadap semangat demi menciptakan lahirnya demokrasi. Menurut sebuah studi pada tahun 1949, menyatakan bahwa pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinobatkan sebagai istilah terbaik dan tepat untuk semua sistem di bidang politik dan sosial (Budiarjo, 2003).

Demokrasi merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami, karena banyaknya pendapat dari para pemikir dunia, sehingga setiap pemikiran memiliki sudut pandang berbeda mengenai demokrasi sendiri. Demokrasi tidak hanya terbatas ke ranah politik semata, namun ada yang berpendapat bahwa demokrasi harus melibatkan semua orang dewasa yang terlibat dan keputusan kolektif yang mengikat asosiasi

yang melibatkan semuanya. Dapat disimpulkan bahwa dalam teori demokrasi, kedaulatan tertinggi diberikan kepada rakyat dan dilaksanakan wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu.

## **Demokrasi Dalam Pandangan Islam**

Islam merupakan suatu sistem dan ajaran yang ilahiah. Islam juga termasuk fenomena dalam peradaban, budaya dan kenyataan sosial yang bukan hanya kumpulan ajaran yang modern dan universal, tetapi memanifestasikan dirinya dalam pranata sosial. Demokrasi tidak datang dengan sendiri dalam kehidupan manusia saat ini, sebab demokrasi memerlukan suatu upaya dalam perwujudannya, khususnya di dunia Islam.

Seperti yang kita ketahui di atas, gagasan utama penerapan demokrasi adalah kebebasan. Sebelumnya istilah demokrasi tidak disebutkan, namun tindakan dan perbuatan masyarakat pada masa terdahulu merupakan salah satu bentuk demokrasi. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kehidupan sosial, dan dalam hubungannya dengan kehidupan rumah tangga, tetangga, masyarakat bahkan negara (Tasar, 2014). Ini mengandung makna bahwa, Islam tidak hanya mengatur perihal ibadah saja namun juga mengatur segala aspek kehidupan, baik itu sosial masyarakat, budaya, maupun bernegara.

Kebangkitan demokrasi Islam berlangsung secara dinamis. Dalam konteks global, masyarakat menuntut kebangkitan dan demokratisasi agama, menjadikan keduanya isu terpenting dalam urusan dunia saat ini. Tuntutan demokrasi cenderung sangat kuat, termasuk di negara mayoritas Muslim (Paralihan, 2019).

Pembahasan tentang kaitan demokrasi dengan Islam pada hakikatnya bersifat aksiomatik. Sebab Islam adalah agama sekaligus risalah yang mewujudkan prinsip-prinsip ibadah manusia, akhlak dan muamalat. Pada saat yang sama, demokrasi hanya daianggap sebagai sistem tata kelola antar masyarakat yang dipercaya akan mendatangkan nilai kebaikan. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mana setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah mengutamakan kepentingan rakyat. Kontroversi tentang kaitan antara Islam dengan demokrasi muncul akibat adanya ambisi untuk memahami doktrin berdasarkan sejarah dinasti Islam dan tuntutan untuk memahami kembali doktrin tersebut (Al-Fandi, 2011).

Al-Maududi dengan gamblang menolak sistem demokrasi. Menurutnya, dalam Islam tidak terdapat konsep demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan atas segala sesuatu, demokrasi bersifat sekuler karena merupakan hasil penentangan dunia Barat terhadap agama. Karena itu, ia menganggap sistem yang berasal dari Barat ini harus dihindari. Ia juga berpendapat bahwa, teokrasi dalam Islam berlandaskan pada hukum yang telah ditetapkan, yakni hukum Allah yang jauh berbeda dengan teokrasi barat abad pertengahan, yang melimpahkan kekuasaan yang tanpa batas kepada pendeta (Al-Maududi, 1993).

Timbul kritik tajam dari pemikir Barat mengenai sistem demokrasi yang mengedepankan kebebasan individu tanpa batas. Menurutnya, demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang ideal karena terlalu banyak memberikan kebebasan individu, demokrasi diletakkan di urutan ke empat setelah penurunan bentuk ideal pemerintahan atau kedua akibat bentuk pemerintahan merosot (Rapar, 2001).

Tampaknya hal yang berusaha didalami dunia Barat merupakan bagian demokrasi yang dikritik oleh salah satu pemikir Yunani, yang berpendapat bahwa sebenarnya demokrasi tidak sesuai menurut pandangan Syariah. Bahwasannya, terdapat ketidaksesuaian dari penerimaan prinsip kebebasan di masyarakat, di mana terkadang yang salah dibenarkan. Misalnya membenarkan kesalahan karena kebebasan dan kepentingan pribadi (individual) dengan mengutamakan suara terbanyak.

Dalam bukunya, Umar berpendapat bahwa pelaksanaan demokrasi belum maksimal, meskipun sudah terjadi perubahan yang dasar sejak runtuhnya Orde Baru. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan demokrasi di era reformasi lebih seperti bebas tanpa batas, yang berujung pada kekacauan (disorder) dalam masyarakat (Umar, 2004). Ini berarti kebebasan itu juga dapat menjadi bumerang bagi suatu pemerintahan jika prinsip kebebasan itu dianalogikan sebagai kebebasan yang sewenang-wenang.

Sesungguhnya Islam dan demokrasi tidak saling bertentangan, hal ini dapat dipandang melalui ciri-ciri negara menurut Islam, yaitu kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, masyarakat memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, kebebasan adalah hak setiap manusia, kesetaraan bagi setiap orang, kumpulan yang tidak sama mempunyai legitimasi, ketidakadilan absolut dilarang dan



tindakan korektif sangat penting, hukum menjadi hal yang paling (Paralihan, 2019). Kenyataannya, muatan demokrasi itu sesuai dengan Islam yang dilandasi simpati serta berusaha memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan nyaman (Rangkuti, 2018).

Di sisi lain, Nabi Muhammad SAW, misalnya, dalam tatanan praktis, tidak hanya menulis ketetapan-ketetapan yang mengarah pada konsep kehidupan berdemokrasi, tetapi beliau senantiasa mengimplementasikannya. Islam bukan secara mutlak menolak demokrasi. Dalam Islam sendiri, istilah demokrasi lebih condong ke istilah syura. Tiap anggota memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapatnya (Hidayat, 2015)

Hal dasar yang membedakan syura dalam Islam dan demokrasi di dunia Barat, yakni Syura dalam Islam di mana semua orang berpartisipasi dalam pemerintahan dan semua kembali kepada al-qur'an serta teladan Nabi Muhammad. Sedangkan dalam demokrasi yang dikembangkan oleh Barat semua masalah harus dikembalikan ke tangan rakyat. Dalam Syura, aturan, hukum, UU pertama-tama harus dikaitkan dengan Al-Qur'an dan keteladanan Nabi, sedangkan dalam demokrasi aturan, hukum, UU dikembangkan dan dikukuhkan oleh orang-orang yang berpikir, apakah akan berproduksi secara langsung, seperti dalam referendum atau melalui perwakilannya.

Jika ditelaah lebih dalam, prinsip-prinsip yang mengiringi demokrasi dalam Islam telah disebutkan dan dapat dikaitkan dengan Al-Qur'an. Seperti Musyawarah atau As-Syura, Keadilan atau Al-'adalah, Memenuhi kepercayaan Al-amanah, Tanggung jawab atau Al-masuliyah, serta Kebebasan atau Al-hurriyyah. Dilihat secara keseluruhan, prinsip-prinsip demokrasi memperlihatkan Islam sebagai agama yang amat demokratis. Tidak cuma terdapat dalam lingkungan teoritis, tetapi juga dalam praktek banyak sekali pembuktiannya. Mungkin hal yang membedakannya terletak pada urutan penerapannya. Jika negara-negara luar memahami demokrasi, maka hak tertinggi untuk menentukan nasib sendiri ada di tangan rakyat. Misalnya, soal ibadah harus diterima di bawah ketentuan agama dan bukan soal refleksi. Kenyataan, kita tidak bisa berdebat tentang jumlah waktu sholat dan kita harus menerima keputusan ini apa adanya, karena tidak bisa diperdebatkan.

Demokrasi memang berbeda dengan Islam. Namun, Islam tidak menolak sistem ini bahkan Islam memberikan landasan yang kuat dalam menjalankan demokrasi. Karena sebenarnya prinsip-prinsip di

dalam demokrasi juga terkandung dalam ajaran islam seperti kebebasan, tanggung jawab, persamaan, musyawarah dan sebagainya. Jika demokrasi merupakan sistem yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kesamaan, dan kedaulatan rakyat dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, maka yang demikian itu, dapat dikatakan bahwa demokrasi memiliki titik temu dengan islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, demokrasi memang tidak ada disebutkan secara eksplisit di al-qur'an. Al-quran sekedar mengatakan seruan musyawarah. Dari prinsip-prinsip tersebut (Musyawarah atau As-Syura, Keadilan atau Al-'adalah, Memenuhi kepercayaan Al-amanah, Tanggung jawab atau Al-masuliyah, Kebebasan atau Al-hurriyyah) terlihat bahwa syura dalam Islam hanyalah sebagian dari demokrasi. Tetapi pada prinsipnya yang berlandaskan nilai-nilai agama (religius) tidak bertentangan dengan kaidah Islam yang berpedoman pada kitab suci al-quran dan as-sunnah yang memberikan landasan moral untuk membangun sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

## **Kesimpulan**

Demokrasi adalah gagasan pokok yang selalu hangat dan tak pernah berhenti dibicarakan. Demokrasi kerap kali dihubungkan dengan berbagai persoalan dalam hidup manusia saat ini, baik dalam urusan negara maupun agama. Demokrasi merupakan istilah luar yang muncul dari Barat dan mempunyai sejarah dan perspektif berbeda dengan yang ada di dalam Islam. Sehingga, muncullah berbagai pendapat mengenai demokrasi dalam pandangan Islam. Demokrasi tidak hanya terbatas ke ranah politik semata, namun ada yang berpendapat bahwa demokrasi harus melibatkan semua orang dewasa yang terlibat dan keputusan kolektif yang mengikat asosiasi yang melibatkan semuanya.

Demokrasi memang tidak ada disebutkan secara eksplisit di Al-quran. Al-quran sekedar mengatakan seruan musyawarah. Hal dasar yang membedakan syura dalam Islam dan demokrasi di dunia Barat, yakni Syura dalam Islam di mana semua orang berpartisipasi dalam pemerintahan dan semua kembali kepada al-qur'an serta teladan Nabi Muhammad. Sedangkan dalam demokrasi yang dikembangkan oleh Barat semua masalah harus dikembalikan ke tangan rakyat. Dalam Syura, aturan, hukum, UU pertama-tama harus dikaitkan dengan Al-Qur'an dan keteladanan Nabi, sedangkan dalam demokrasi aturan,

hukum, UU dikembangkan dan dikukuhkan oleh orang-orang yang berpikir, apakah akan berproduksi secara langsung, seperti dalam referendum atau melalui perwakilannya. Sejatinya, demokrasi yang bernilai keagamaan (religius) sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam memberikan landasan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dalam membangun sistem demokrasi.

## Daftar Pustaka

- Al-Fandi. H., (2011). *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Al-Maududi, A.A. (1993), *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Terjemahan Asep Hikmat*. Bandung: Penerbit Mizan
- Budiarjo. M. (2003), *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 50
- Darmawati, (2013). *Demokrasi dalam Islam, Suatu Tinjauan Fikih Siyâsah*. Makasar: Alaudin University Press, hal. 30-31
- Hidayat. A. (2015). SYURA DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *ADDIN, Volume, 9 (2)*
- Ichsan. M. (2014). Demokrasi dan Syura. *Substantia Volume, 16 (1)*
- Noor Ms. Bakry. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 205 – 208)
- Nurul. H. & Sri. R. (2021). Implementasi, Nilai-Nilai Demokrasi, Pembelajaran, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Dewantara, Volume, 7 (1)*
- Paralihan. H. (2019). Hubungan antara Islam dan Demokrasi (Menguatnya Politik Identitas Ancaman Kemanusiaan di Indonesia). *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam Volume, 10 (1)*, 63-84.
- Rangkuti. A. (2018). Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat *Islamic And West View Democracy. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Volume, 5 (2)*
- Rapar, (2001). *Filsafat Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Taranggono. E. "Islam dan Demokrasi: Upaya Mencari Titik Temu" ..., .hal. 1
- Tasar. M. (2014). Demokrasi dalam Islam. *JIPSA, Volume 14 (1)* hal. 58

Umar, M. (2004). *Al-Quran, Demokrasi Politik & Ekonomi*, Jakarta: INSED

Wahidi. S. (2015). *Dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 241.

Zuhraeni, “*Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik, dalam Jurnal Studi Keislaman...*hal. 30.